Jurnal Administrasi, Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]
Volume [2] No. [1] Juni 2021
Online ISSN 2721-1886

OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI JENEPONTO

Risdayanti[1], Syamsurijal Basri[2]
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar

alamat e-mail:
yrisda592@gmail.com[1]
rijal@unm.ac.id[2]

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:1). Bagaimana peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto, 2). Apa faktor pendukung dan penghambat peranan komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto menunjukkan bahwa: 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam upaya peningkatan mutu sekolah dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) serta sebagai mediator *(executive*) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

Kata Kunci : Peran Komite Sekolah

Abstrack **:** This study examines the role of school committees in Jeneponto State Madrasah Aliyah Negeri. The focus of research in this study are: 1). What is the role of the school committe in jeneponto state Madrasah Aliyah, 2). What factors support and hinder the role of school committees in Jeneponto State Madrasah Aliyah. The approach used in this study is a qualitative approach. Data sources in this study are the principal, school committee, and community leaders. Data collection techniques through interviews, obsevation and documentation. The data obtained were analyzed through the data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research on the role of school committees in Jeneponto State Aliyah Madrasah, it shows that: 1) as an advisory agency, the school committee as the principal's work partner has given its consideration in every plan and program that has been prepared by the school. 2) as a supporting agency, the role of the school committee as a supporting body in efforts to improve the quality of school can be in the form of financial support, egency, and mind support. For example, the committee helps assit and support school facilities and infrastructure. 3) as a controlling (controlling agency), the school committee controls or supervises the decision making of the principal or planning education in the school. 4) as well the mediator (executive) of the school committee as a liaison or mediator between the government, the school, parents and

the community means that the aspirations of the student's parents are all through the school committee.

Keywords: the role of the school committee

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat telah memahami akan penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Masyarakat khususnya orang tua mengharapkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik mulai dari SD sampai pada tingkat pendidikan Tinggi. Orang tua sangat selektif dalam memilih Sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka mempertimbangkan dari aspek akademis meliputi: prestasi, dan tenaga pendidik atau guru. Selain dari aspek akademis, juga memperhatikan aspek non akademis seperti: fasilitas sekolah, sarana dan prasarana sekolah dan hubungan sekolah dengan pihak lain.

Mengingat sumber daya manusia sebagai aset nasional yang mendasar dan faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan, maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan terus-menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana yang paling strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui lembaga.

Peningkatan kualitas pendidikan juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat karena pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pendidikan bukan objek pendidikan. Dalam hal ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan.

Untuk menampung aspirasi masyarakat maka dibentuklah suatu wadah yang diberi nama komite sekolah. Komite sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan diluar satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dari hasil pendidikan.

Keberadaan komite sekolah sangat penting dalam upaya pemberdayaan sekolah. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite sekolah bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah dan kriteria fasilitas pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada bulan September 2018, peneliti menemukan permasalahan yang menyangkut komite sekolah yaitu komite sekolah tidak mempunyai program kerja sendiri, sehingga komite sekolah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada program kerja yang harus mereka laksanakan. Komite sekolah akan melaksanakan program yang telah dibuat oleh kepala sekolah sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja komite sekolah dalam memerankan peran dan fungsinya, karena program kerja komite masih ikut dalam program kerja sekolah.

Keberadaan komite sekolah sangat penting dalam upaya pemberdayaan sekolah. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite sekolah

bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah dan kriteria fasilitas pendidikan di sekolah

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komite Sekolah

Menurut Departemen Pendidikan Nasional yang tercantum Kepmendiknas bernomor: 044/U/2002, menyatakan bahwa: komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Rusman (2008) menyatakan bahwa: komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Mulyasa (2006) mengatakan bahwa Komite Sekolah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum berbasis kompensi (KBK).

2.2. Peran Komite

Secara lebih jelas peran Komite Sekolah atau Komite Madrasah pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 56 disebutkan bahwa:

a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
b. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pada tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan pada Kepmendiknas nomor: 044/U/2002, peran dari Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
b. Pendukung (*supportung agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Pengontrol (*controlling agency*) dalama rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

2.3. Fungsi Komite Sekolah

Berdasarkan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002, peran dari Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah daerah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
   1) Kebijakan dan program pendidikan.
   2) Kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan.
   3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
   4) Kriteria fasilitas pendidikan
   5) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

2.4. Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah yang berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memilki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah terdiri dari setiap satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan yang lain.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demokrafis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocary*) dan kemitraan (*partnership model*) pada peningkatkan kualitas pendidikan sekolah.

Menurut Mulyasa (2011: 128) tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan layanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

2.5.Faktor Pendukung dan Penghambat peran Komite Sekolah

faktor pendukung dan penghambat komite sekolah dalam menjalankan perannya:

1. Faktor pendukung

Bahwa untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu adanya dorongan atau dukungan baik dari pemerintah, pihak sekolah dan komite sekolah, yakni:

a) Transparan berarti pembentukan komite sekolah dilakukan secara terbuka. Diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan

penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat.

b) Akuntabel dalam arti pembentukan komite sekolah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara fungsional.

c) Demokratis berarti pembentukan komite sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

2. Faktor Penghambat

Lembaga komite sekolah telah ada dan dibentuk disetiap sekolah di indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah terutama didaerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi beberapa harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif. Disatu pihak ada komite sekolah yang masih melanjutkan peran dan fungsi BP3 yang sering dsebut sebagai stempel kepala sekolah dan adapula komite sekolah yang justru ditakuti oleh kepala sekolah.

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan perannya belum optimal, permasalahan termasuk antara lain:

a) Masalah pemahaman, pemahaman tentang komite sekolah sangat beragam tentang peranannya, pembentukannya, keterwakilannya dalam susunan anggota dan yang lebih fatal lagi komite sekolah belum mempunyai AD dan ART komite.

b) Masalah budaya yang dimaksudkan disini adalah berfikir serta bertindak masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen.

c) Masalah pembinaan komite sekolah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk sekolah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir komite sekolah belum dapat berfungsi dengan baik.

d) Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya peran komite sekolah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati. Adapun tujuan dari penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jeneponto secara lebih mendalam.

3. 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti berperan besar dalam sebuah proses penelitian mulai dari memilih topik, mendekati topik, mengumpulkan hingga menganalisis dan menginterpretasikannya. Kehadiran peneliti dalam penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan langsung. Peneliti berusaha mengungkap fakta yang berhubungan dengan gambaran peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto.

3. 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Jeneponto terletak di jalan lanto Dg. Pasewang No. 351 kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

3. 4. Sumber Data

Data-data penelitian bersumber dari wawancara (kepada Kepala sekolah, Komite sekolah, guru serta tokoh masyarakat), observasi (pengamatan langsung), dan dokumentasi yang dihimpun oleh peneliti terkait dengan implementasi peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto.

3. 5. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka peniliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto. Yaitu melihat lokasi penelitian, memperhatikan perilaku informan, mendengarkan pendapat informan, serta hal-hal yang berkaitan dengan peran komite sekolah.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur atau bebas. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sehingga diharapkan akan mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam tentang gambaran implementasi peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto.

3. Dokumentasi

Dokumen dalam metode ini berupa sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto visi misinya, SK Komite, struktur komite sekolah, keadaan dan jumlah guru serta tenaga lainnya, dan keadaan sarana dan prasarana.

3. 6. Analisis Data

Lexy J. Moleong (2010:320) keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data dalam model Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14), melalui 4 tahapan yaitu, "(1) pengumpulan data *(data collection)*, (2*)* kondensasi data (*data condensation)*; (3) penyajian data (*data display*); dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)".

Pengumpulan data, mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

Kondensasi data, dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian transkrip lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan yang didapatkan di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto kemudian disajikan ke dalam matriks analisis data melalui proses kondensasi data (dirangkum, dikelompokkan, dan kemudian dipilih-pilih hal yang pokok). Data yang di kondensasi yaitu data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan hasil dokumentasi untuk disajikan.

Selanjutnya penyajian data, dilakukan dengan menguraikan data yang telah disortir/direduksi kemudian diuraikan secara mendetail. Penguraian dilakukan sesuai dengan data yang di dapatkan di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto. Penguraian data diinterpretasikan menurut kelompoknya

dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan pemaparan data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan /verifikasi, yang menjadi dasar penarikan kesimpulan besar penelitian. Verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Peran Komite Sekolah

Adapun peran yang dijalankan oleh komite sekolah yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi pertimbangan *(advisory Agency):*Komite sekolah Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, misalnya memberikan pertimbangan dan mengesahkan RAPBS, memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini juga dilihat dari program kerja yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto yaitu pengadaan kelas IT, program tersebut disetujui oleh komite sekolah dan masyarakat, dengan alasan agar dapat menambah wawasan siswa mengenai IT dan dapat mempermudah siswa dalam mencari referensi serta tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Memberikan pertimbangan dan masukan mengenai pembelajaran pada guru, memberikan pertimbangan mengenai kriteria tenaga kependidikan dengan menyarankan sekolah untuk mengirimkan perwakilan guru dalam mengikuti seminar, diklat maupun *workshop* agar dapat meningkatkan profesionalnya., serta memberikan pertimbangan anggaran yang dimanfaatkan di sekolah.
2. Peran komite sebagai pendukung *(supporting Agency)* Sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan kualitas sekolah dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah. Komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa yang berlandaskan keikhlasan orang tua siswa tersebut, ini dilakukan agar sekolah Madrasah Aliyah Negeri bisa juga bersaing dengan sekolah lain karena meningkatnya sarana dan prasarana ataupun pengembangan fisik sekolah.
3. Sebagai badan pengontrol *(controlling Agency)*, komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto dengan mengontrol proses belajar-mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fisilitas sekolah seperti komputer, meja, kursi, dan buku. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu sekolah.
4. Sebagai badan mediator (executive), komite sekolah sebagai penghubung

atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasikan kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi kearah perbaikan. Keberadaan komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto ini banyak memberikan manfaat yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian sekolah kepada orang tua itu disampaikan oleh komite sekolah secara kekeluargaan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat dukungan dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu sekolah.

4.2. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto

Setiap lembaga suatu organisasi pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sebuah organisasi tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada, begitu juga dengan organisasi komite sekolah yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto dalam menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan komite sekolah.

Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu sekolah, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. Adapun faktor pendukung itu diantaranya:

a. Ada kesamaan visi antara sekolah dan komite sekolah.
b. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan komite sekolah yang sudah terjalin.
c. Adanya saling keterbukaan antara komite sekolah dengan sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi.
d. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur didalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota komite sekolah.
e. Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.

Dengan adanya faktor pendukung ini kita bisa melihat bahwa adanya kesamaan antara visi sekolah dan komite sekolah, yang menjadikan kerja sama yang baik dan dorongan yang baik dimana terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis sehingga terjadi kekompakan dalam menjalankan sebuah program kerja yang membuat visi murid juga ikut sepakat dan mendukung program kerja sekolah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat diantaranya:

a. Masalah kurangnya SDM
b. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi
c. Kurangnya koordinasi antara pengurus

Dari masalah diatas bisa dilihat bahwa, adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat peran komite sekolah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan Cuma komite sekolah

yang aktif dalam kepengurusan ini. Selanjutnya, kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi, ini dikarenakan pengurus belatar belakang yang berbeda dan mengganggap bahwa organisasi komite sekolah bukan pekerjaan pokok mereka, sehingga harus ada keikhlasan menyisihkan waktu untuk organisasi. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pengurus, ini diakibatkan kurangnya pertemuan antara pengurus karena pengurus mempunyai kesibukan masing-masing seperti petani, wiraswasta, dan tokoh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

1. Peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite sekolah Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, misalnya memberikan pertimbangan dan mengesahkan RAPBS, Memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini juga dilihat dari program kerja yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto yaitu pengadaan kelas IT, program tersebut disetujui oleh komite sekolah dan masyarakat, dengan alasan agar dapat menambah wawasan siswa mengenai IT dan dapat mempermudah siswa dalam mencari referensi serta tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Memberikan pertimbangan mengenai kriteria tenaga kependidikan dengan menyarankan sekolah untuk mengirimkan perwakilan guru dalam mengikuti seminar, diklat maupun *workshop* agar dapat meningkatkan profesionalnya., serta memberikan pertimbangan anggaran yang dimanfaatkan di sekolah.

b.Sebagai badan pendukung *(supporting agency)*, Sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan kualitas sekolah dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah. Komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa yang berlandaskan keikhlasan orang tua siswa tersebut, ini dilakukan agar sekolah Madrasah Aliyah Negeri bisa juga bersaing dengan sekolah lain karena meningkatnya sarana dan prasarana ataupun pengembangan fisik sekolah.

c.Sebagai badan pengontrol (*controling agency*), komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto dengan mengontrol proses belajar-mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fisilitas sekolah seperti komputer, meja, kursi, dan buku. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu sekolah.

d.Sebagai badan mediator *(Executive)*, komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah,

sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasikan kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi kearah perbaikan. Keberadaan komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto ini banyak memberikan manfaat yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian sekolah kepada orang tua itu disampaikan oleh komite sekolah secara kekeluargaan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat dukungan dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu sekolah.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto

a. Faktor Pendukung

1) Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.

2) Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.

3) Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.

4) Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah.

5) Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.

b. Faktor Penghambat

1) Masalah kurangnya SDM (sumber daya manusia).

2) Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.

3) Kurangnya koordinasi antara pengurus.

5. 2. Saran

1.Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan kualitas sekolah , maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama baik dengan guru , orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

2. Peran komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparasi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan kualitas sekolah semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.

3. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program dalam peningkatan kualitas sekolah.

4. Disarankan kepada pihak sekolah agar segera mungkin mengadakan musyawarah pembentukan komite sekolah yang baru supaya peran komite sekolah kedepannya lebih optimal dan lebih terkoordinasi dengan baik agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem*

Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Kementerian Pendidikan Nasional RI. 2002. *Keputusan Mendiknas Nomor 044 / U / 2002 tanggal 2 April 200*2. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.

Moleong, Lexy J..2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Staff UGM. (Online) (http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf), diakses 10 September 2018.

Rusman. 2008. *Manajemen Kurikulum "Seri Manajemen Sekolah Bermutu"*. Bandung: Mulia Mandiri Press.